

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Suhaimi Bakal Perjuangkan KJP

Palmerah, Warta Kota

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi menyatakan, akan memperjuangkan kebutuhan anak Jakarta untuk dapat menuntaskan sekolah selama 12 tahun.

Selain sekolah gratis, menurut dia, anak Jakarta juga membutuhkan penunjang lain yang perlu disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Selain sekolah gratis, anak-anak kita juga harus mendapat hak yang wajar. Dari sisi kesejahteraan harus diperhatikan juga," kata Suhaimi dari keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Meski demikian, Suhaimi berharap program sekolah swasta gratis tidak menghapus bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, masyarakat sudah sangat merasakan manfaat dari KJP.

"Kalau sebagai wakil rakyat, tentu kita akan perjuangkan itu, apa yang sudah pernah diperoleh, jangan sampai tidak didapatkan lagi," tutur Suhaimi.

Alasannya, sambung Suhaimi, pendidikan gratis harus dibarengi dengan pemenuhan gizi dan penunjang untuk sekolah.

Di antara kebutuhan penunjang anak yakni seragam dan biaya transportasi. Terlebih bila orangtua siswa

termauk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program yang sudah baik dirasakan masyarakat tidak boleh dihilangkan, justru harus lebih baik lagi," ungkap Suhaimi.

Politisi PKS ini juga meminta Dinas Pendidikan mulai mempersiapkan hitungan kebutuhan anggaran secara matang. Hal itu guna menyukseskan program sekolah swasta gratis, dan beberapa bantuan pendukung.

"Butuh didetailkan berapa biaya untuk sekolah gratis dan berapa biaya untuk bantuan sosial yang mensupport kesejahteraan masyarakat. Kami perjuangkan di pembahasan APBD murni 2025," pungkas Suhaimi.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta memastikan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di wilayah setempat bakal dihapus dan diganti dengan sekolah gratis.

Alokasi dana KJP akan dialihkan untuk membiayai pendidikan anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri agar bisa mengenyam pendidikan gratis disekolah swasta.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Iman Satria mengatakan, total pagu anggaran KJP setiap tahun mencapai Rp 2,8 triliun.

Rp 2,3 triliun

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama konsultan, total kebutuhan program pendidikan gratis di sekolah swasta mencapai Rp 2,3 triliun.

"KJP sudah tidak ada lagi, dihapus (anggaran) dialokasikan untuk sekolah gratis. Hitung-hitungannya di angka Rp 2,3 triliun sudah cukup (sekolah gratis), sementara KJP kita Rp 2,8 triliun," kata Iman usai rapat kerja dengan eksekutif soal program sekolah gratis di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (23/8/2024).

Turut hadir Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin beserta jajarannya. Iman berkata, selisih uang sekitar Rp 500 miliar nantinya akan diberikan kepada anak-anak untuk membeli keperluan sekolah guna menunjang pendidikannya.

"Jadi (selisih) mungkin akan kami berikan bantuan kepada anak-anak untuk seragam dan lainnya untuk 238.000 lebih (anak-anak) disekolah swasta," ujar Iman.

Menurut dia, kebijakan ini baru akan diterapkan pada 2025 mendatang karena Disdik masih melakukan kajian terlebih dahulu.

Di sisi lain, DPRD akan mematangkan konsep itu melalui kebijakan anggaran, sehingga ketika disetujui maka anggaran bisa langsung digelontorkan.

"Ini memang harus dipikirkan baik-baik. Dinas Pendidikan memanggil konsultan, menghitung dan lain-lain. Ini legacy (warisan) dari kami yang di periode 2019-2024," tuturnya.

Iman berharap, kebijakan ini bisa meringankan beban orang tua terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Anak-anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa perlu orang tua pusing memikirkan iuran sekolah.

Iman tidak menampik, begitu banyak persoalan yang masuk terkait ijazah ditahan oleh pihak sekolah karena orang tua tidak mampu membayar iuran sekolah setiap bulan. Persoalan ini, lanjut Iman, akan diselesaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 mendatang.

"Itu akan kami selesaikan, mesti dibuka ijazah dari berapa tahun ke belakang yang harus kami bereskan. Ini salah satu cikal bakal karena ijazah-ijazah yang tertinggal, anak-anak yang tidak diterima di PPDB. Ini (ijazah ditahan) sudah nggak boleh terjadi," ucapnya.

(faf)